

EFEKTIVITAS PROGRAM DESA YANG DIDANAI OLEH APBN (DANA DESA) TAHUN 2016 DI BANJARSARI, GRABAG, MAGELANG

Khikmah Wulandari ¹Dr. Samodra Wibawa, M.Sc. ² dan Dr. Bambang Kuntjoro, M.Si. ³

¹Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar; Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116, telp (0293) 364113 /fax (0293) 362438

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL UNTIDAR, Magelang

²³Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

e-mail: khikmah.wulandari@yahoo.com ²samodra03@yahoo.com, ³bkun@ymail.com

ABSTRACT

Latar belakang masalah penelitian ini adalah masih banyak sarana dan prasarana yang kurang memadai dan Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang masih kurang. Sehingga memerlukan banyak dana untuk memperbaikinya, salah satunya yaitu APBN yang dialokasikan untuk Dana Desa. Tujuan Penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas program desa yang didanai oleh APBN yang dialokasikan untuk Dana Desa tahun 2016 di Desa Banjarsari Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang dan mengetahui faktor-faktor penunjang dan penghambat program.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 19 orang yang terdiri dari pelaksana program dan sasaran program dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis data model interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program desa yang didanai oleh APBN yang dialokasikan untuk Dana Desa tahun 2016 di Desa Banjarsari Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang sudah berjalan secara efektif, yaitu pelaksanaan program desa yang tepat sasaran, tepat waktu, tujuannya tercapai, memberikan perubahan nyata dan semua pihak yang terlibat paham terhadap program desa tersebut. Faktor penunjang efektivitas program desa ini yaitu: Faktor komunikasi, Faktor disposisi dan Faktor struktur organisasi. Untuk faktor penghambatnya adalah Faktor sumber daya.

Kata Kunci: Efektivitas, Program, Dana Desa 2016

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa mempunyai kedudukan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Pembangunan desa merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. Pembangunan ini bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat desa. Selain itu pembangunan desa dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa. Dalam melaksanakan pembangunan desa agar berjalan dengan baik, harus didukung oleh kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayainya.

Pada penelitian ini mengkaji tentang efektivitas program desa di Desa Banjarsari yang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang. Berdasarkan RPJMDes Tahun 2011-2015 permasalahan pokok yang dihadapi oleh Desa Banjarsari adalah masih banyaknya sarana dan prasarana yang kurang memadai, misalnya masih terdapat tebing yang masih terbuat dari tanah, masih ada saluran air yang berasal dari tanah dan akses jalan yang sulit karena tidak adanya jembatan.

Berdasarkan Data Tanah Lonsor Geospasial BNPB menyebutkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2015 jam 15.00 WIB telah terjadi tanah lonsor di RW. 09 RT. 17 Dusun Mejing Desa Banjarsari Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. Tanah lonsor tersebut menimpa rumah

milik Bapak Ansori yang mengakibatkan rusak. Kejadian ini disebabkan karena hujan deras dengan intensitas sedang-lebat.

Berdasarkan pengamatan peneliti, apabila hujan saluran air tersumbat sehingga mengakibatkan banjir. Selanjutnya permasalahan SDM (Sumber Daya Manusia), misalnya SDM Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dengan status pendidikan terakhir tingkat SMP. Mengingat Perlindungan Masyarakat (LINMAS) merupakan sebuah lembaga yang berfungsi memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat. Oleh sebab itu Perlindungan Masyarakat (LINMAS) harus memahami wawasan kebangsaan serta dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu juga SDM Perangkat Desa masih kurang dalam bidang pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya perangkat desa yang kurang paham tentang tugas pokok dan fungsinya sehingga kinerjanya menjadi kurang maksimal. Mengingat pemerintah desa merupakan suatu pemerintahan paling bawah yang sangat penting karena langsung berhubungan dengan masyarakat.

Sehingga desa ini masih memerlukan banyak dana untuk memperbaiki sarana dan prasarana serta meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk kemajuan desa. Dengan didukung adanya salah satu sumber keuangan desa transfer yaitu dana desa, pemerintah Desa Banjarsari melaksanakan program desa sebagai upaya untuk mengurangi permasalahan yang dialami oleh desa. Berdasarkan RKPDes Tahun 2016 menyebutkan bahwa Program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Banjarsari terdiri atas program

pembangunan sender, drainase, jembatan, kegiatan Bela Negara, kegiatan BIMTEK peningkatan kinerja Kepala Desa beserta Perangkat Desa.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Program Desa yang Didanai Oleh APBN (Dana Desa) Tahun 2016 Di Desa Banjarsari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang”.

2. KAJIAN PUSTAKA

Menurut Ratminto dan Atik (2012:174) efektivitas adalah tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Selanjutnya menurut Westra, Dkk (Rukmana, 2013:35) program adalah rumusan yang memuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya. Efektivitas program merupakan penilaian terhadap tingkat kesesuaian program berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan, kemudian dibandingkan dengan pencapaian hasil program (Makmur, 2008:34).

Menurut Sutrisno (2007:125-126), ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan untuk mengetahui sejauh mana keefektifan sebuah program atau suatu kegiatan diantaranya:

a. Pemahaman Program

Pada indikator ini yang dimaksudkan adalah bagaimana suatu program direalisasikan sehingga dapat dengan mudah diterima dan dipahami. Hal ini dimaksudkan ketika program dijalankan dapat dengan mudah dan efektif dalam proses pelaksanaannya. Pihak yang perlu memahami

program ini adalah semua pihak yang terlibat dalam proses kegiatan program tersebut.

b. Ketepatan Sasaran

Sasaran dibahas pada indikator ini merupakan hal yang perlu ditinjau langsung akan keberadaan program. Karena keberadaan program yang dirancang apakah sudah tepat sasaran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu program dapat dikatakan efektif apabila program sesuai dengan sasaran yang telah dilakukan sejak awal.

c. Ketepatan Waktu

Indikator selanjutnya adalah ketepatan waktu, waktu merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses kehidupan. Ketepatan waktu dalam hal ini suatu program dikatakan efektif apabila pelaksanaan program sesuai dengan aturan waktu. Semakin tepat pada saat pelaksanaan program maka semakin efektif program dapat terealisasi.

d. Tercapainya Tujuan

Pada indikator ini menilai tingkat keefektifan suatu program dengan mengetahui bagaimana tujuan yang telah ditetapkan sejak awal dapat dicapai. Tercapainya tujuan pada program dilihat dari sejauh mana beberapa tujuan yang sudah menjadi aturan sejak awal program ini dapat tercapai. Semakin banyak memberikan manfaat dapat dikatakan efektif apabila tujuan telah dicapai.

e. Perubahan Nyata

Mengukur keefektifan dengan memberikan perubahan nyata, dimaksudkan bahwa aturan yang telah ditetapkan sejak awal dapat direalisasikan dengan baik sesuai dengan rencana. Kemudian sasaran dari program desaini juga berperan penting

dalam melaksanakan program. Artinya dengan melihat, meninjau, dan meneliti langsung apakah memberikan perubahan bagi para warga masyarakat. Perubahan bisa terjadi dalam kategori dampak positif maupun negatif.

Menurut peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.

Menurut Edward III (Hidayah, 2012:46) terdapat empat faktor yang berpengaruh pelaksanaan suatu kebijakan, yaitu :

a. Faktor sumber daya

Indikator-indikator yang dipergunakan untuk melihat sejauhmana sumber daya dapat berjalan dengan rapi dan baik adalah:

1. Staf

Sumber utama dalam implementasi kebijakan adalah staf pegawai, atau lebih tepatnya *street-level bureaucrats*. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak memadai, mencukupi ataupun tidak kompeten dibidangnya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan staf pelaksana kebijakan.

2. Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk. Pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, implementor harus mengetahui apa yang harus

mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap regulasi pemerintah yang telah ditetapkan, implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut patuh terhadap hukum.

3. Wewenang

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Kewenangan harus bersifat formal untuk menghindari gagalnya proses implementasi karena dipandang oleh publik implementor tersebut tidak terlegitimasi. Tetapi dalam konteks yang lain, efektivitas kewenangan dapat menyurut manakala diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri maupun kelompoknya.

4. Fasilitas

Fasilitas fisik sebagai sarana dan prasarana pendukung diperlukan untuk memperlancar proses komunikasi kebijakan.

b. Faktor komunikasi

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan faktor komunikasi, yaitu:

1. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali komunikasi yang telah melalui beberapa tingkatan birokrasi menyebabkan terjadinya salah pengertian (*miskomunikasi*).

2. Kejelasan

Komunikasi yang telah diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas, akurat dan

tidak ambigu, sehingga dapat dihindari terjadinya perbedaan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan seperti yang telah ditetapkan (tidak tepat sasaran).

3. Konsistensi

Perintah yang diberikan kepada implementor haruslah konsisten dan jelas. Karena apabila perintah sering berubah-ubah akan membingungkan pelaksana kebijakan, sehingga tujuan dari kebijakan tidak akan tercapai.

c. Faktor Disposisi

Hal-hal penting yang perlu diperlukan pada faktor disposisi menurut Edward III, antara lain:

1. Pengangkatan Birokrat

Pemilihanan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga. Disposisi atau sikap para implementor yang tidak mau melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan akan menimbulkan hambatan-hambatan bagi tercapainya tujuan dari pengimplementasian kebijakan.

2. Insentif

Edward III (Hidayah, 2012:49) menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi kecenderungan sikap para pelaksana kebijakan adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya, orang bertindak berdasarkan kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh pembuat kebijakan dapat mengurangi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin dapat memotivasi para pelaksana kebijakan untuk dapat melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan dalam upaya

memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

d. Faktor Struktur organisasi

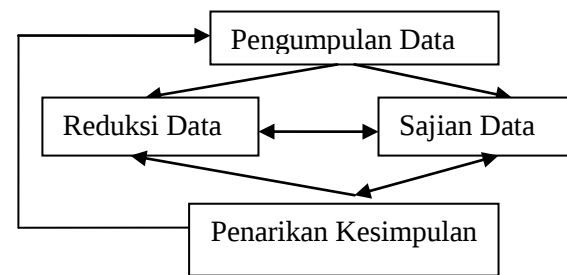
Menurut Edward III (Hidayah, 2012:50) terdapat dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan sebagai berikut:

1. *Standar Operating Prosedure (SOP)* adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pelaksana kebijakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan setiap hari dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang yang dialami subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khususnya yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah (Meleong, 2010:6)

Proses analisis data ini peneliti lakukan secara terus menerus bersamaan dengan pengumpulan data dan setelah pengumpulan data selesai, maka peneliti melakukan analisis data yang mengacu kepada beberapa tahapan analisis interaktif.



Gambar 3.1 Gambar Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Sugiyono, 2014:404

Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014:404) analisis interaktif terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Program Desa Yang Didanai Oleh APBN (Dana Desa) Tahun 2016 di Desa Banjarsari Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang.

a. Program Pembangunan Sender (Talut)

Berdasarkan penelitian semua pihak yang terlibat dalam pembangunan ini sudah paham dan mengetahui karena mereka mengetahui dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan dalam melaksanakan pembangunan sender atau talut. Sender (Talut) ini sudah tepat sasaran karena dilakukan pada tebing-tebing yang berfungsi sebagai penyangga jalan yang mudah longsor. Pembangunanya dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, yaitu selama 1 bulan pada bulan Agustus sampai dengan bulan September. Tujuan dari pembangunan ini sudah tercapai misalnya memperkuat tebing, memperlebar jalan, tidak mudah longsor dan menambah keindahan. Pembangunan sender (talut) ini banyak memberikan perubahan nyata yang bersifat positif

misalnya jalan menjadi lebih lebar, tambah kokoh dan juga menambah keindahan.

b. Program Pembangunan Drainase (Selokan)

Hasil penelitian menunjukan semua pihak mengetahui dan paham karena mereka semua dapat menerangkan kembali tentang program yang dilaksanakan tersebut dan mereka paham dan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Pembangunan ini tepat sasaran karena pembangunan itu dilaksanakan atas dasar permintaan dari masyarakat dan memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu dilaksanakan didusun yang belum mempunyai selokan maupun yang mempunyai selokan tetapi masih berasal dari tanah. pembangunan drainase (selokan) dilakukan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan yakni 1 bulan dari bulan Agustus sampai dengan September 2016 yaitu hanya 31 hari. Pelaksananya sudah mencapai tujuan misalnya memperlancar aliran air sehingga tidak tersumbat, jalan desa tidak mudah rusak atau awet, dan untuk menambah keindahan serta tidak menimbulkan banjir. Perubahan Nyata yang terjadi sangat banyak perubahan nyata yang bersifat baik seperti lingkungan menjadi bersih, jalan menjadi awet air mengalir pada jalurnya, dan mengenang padat empat yang diinginkan misalnya di sawah sehingga tidak membanjiri pemukiman penduduk dan juga lingkungan tidak licin.

c. Program Pembangunan Jembatan

Dari hasil penelitian semua pihak paham terhadap program pembangunan jembatan ini. Misalnya mereka sudah bisa menjelaskan tujuan atau manfaat dan proses pelaksanaanya.

Pembangunan jembatan dilaksanakan tepat sasaran karena berada di lokasi yang sulit untuk dilalui masyarakat dan karena aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Jembatan ini dilaksanakan secara tepat waktu yaitu 7 hari. Tujuan dari pelaksanaan pembangunan jembatan sudah tercapai yaitu masyarakat dapat mudah melewati baik berjalan kaki maupun menggunakan sepeda motor. Perubahan nyata yang terjadi misalnya menambah kelancaran mobilitas, keindahan, sudah bisa dilewati dengan kendaraan sepeda motor, yang tidak bisa dilewati jadi bisa dilewati, mempercepat pertumbuhan ekonomi, jalur komunikasi lancar dan yang jauh menjadi dekat tidak perlu memutar arah.

d. Program Kegiatan Bela Negara

Hasil penelitian semua pihak yang terlibat didalam pelaksanaan kegiatan bela negara LINMAS sudah paham dan mengetahui. Pelaksanaan program kegiatan bela negara tepat sasaran karena sesuai dengan aspirasi anggota LINMAS. Kegiatan bela negara LINMAS dilakukan tepat waktu yaitu sesuai dengan rencana yakni 1 hari pada bulan Desember 2016. Tujuanj dari kegiatan bela negara untuk LINMAS ini telah tercapai misalnya anggota LINMAS bisa PBB (Pendidikan Baris Berbaris), paham tentang dasar-dasar hukumnya dan cara melakukan pengamanan desa dan melatih kedisiplinan. program bela negara yang diselenggarakan untuk seluruh anggota LINMAS memberikan perubahan nyata seperti para anggota LINMAS menjadi bisa PBB (Pendidikan Baris Berbaris), mengetahui tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan LINMAS

sehingga keamanan serta ketentraman masyarakat tercipta.

e. Program Kegiatan BIMTEK Peningkatan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa

Berdasarkan penelitian semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program BIMTEK sudah paham dan mengetahui. Pelaksanaan BIMTEK merupakan suatu kegiatan yang tepat sasaran karena sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan BIMTEK tepat waktu karena dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yakni 1 hari pada bulan Desember 2016. pelaksanaan kegiatan BIMTEK sudah mencapai tujuannya yaitu misalnya meningkat pengetahuan dan pengalaman serta kepaahaman perangkat desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pelaksanaan BIMTEK memberikan perubahan nyata yang berupa kinerja kepala Desa dan perangkat desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, bisa mengerjakan tugas-tugas baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintahan diatasnya, pengetahuan perangkat yang tadinya kurang menjadi lebih paham, dan menambah pengetahuan.

Faktor-faktor Penunjang dan Penghambat Efektivitas Program

a. Faktor Sumber Daya

Berdasarkan penelitian staf TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) di Kantor Kepala Desa Banjarsari sudah memadai jumlahnya untuk menjangkau 7 dusun karena langsung berhubungan dengan panitia dusun dan masyarakat yang ada proyek atau program. Latar belakang pendidikan serta bidang pekerjaannya sudah sangat membantu serta mendukung dalam melaksanakan tugas untuk

mengelola kegiatan dilapangan dan menghadapi masyarakat sehingga kendala-kendala yang terjadi bisa diminimalisir. Meskipun ada yang SDMnya masih kurang dalam bidang penggunaan komputer dikarenakan usia yang sudah tua sehingga sulit untuk bisa menggunakan komputer.

Informasi mengenai program dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat dengan bermusyawarah warga masyarakat, dan RT/RW setempat dirumah Kadus mengenai program desa yang akan dilaksanakan. Sosialisasi sebagai cara memberikan pengetahuan mengenai panitia pelaksana tingkat dusun, target yang ingin dicapai, besarnya dana, dan pengadaan barang sehingga masyarakat lebih mengerti dan lebih paham dalam pelaksanaan program desa, kemudian pemberian HOK (Harian Orang Kegiatan) ini cara dan usaha pelaksana untuk memotivasi dan memberikan semangat kepada warga agar ikut terlibat dalam pelaksanaan program desa serta untuk meningkatkan uang khas desa untuk pengembangan pembangunan tanpa meminta iuran dari masyarakat.

Kerjasama dan koordinasi dari pihak terkait dalam melaksanakan program desa di Desa Banjarsari tersebut sudah baik, misalnya pihak kecamatan yang menjadi tutor dalam pelaksanaan kegiatan BIMTEK peningkatan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa, pihak polsek dan koramil dalam pelaksanaan kegiatan bela negara LINMAS, TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dan panitia dusun dalam melaksanakan program pembangunan baik sender (talut), drainase (selokan), dan jembatan.

Fasilitas di Desa Banjarsari masih perlu untuk ditambah karena akan mempengaruhi kinerja mereka. Fasilitas yang perlu ditambah misalnya internet untuk pelaporan yang bersifat online. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan program desa yang ada. Hanya saja dalam mengirim pelaporan ke kabupaten menjadi terhambat.

b. Faktor komunikasi

Kepala desa dalam menyampaikan informasi tentang program desa melalui musyawarah perangkat desa agar semua perangkat desa mengerti. Selain komunikasi yang terjadi antara kepala desa dengan perangkat desa, komunikasi juga dilakukan dengan masyarakat tentang program desa melalui musyawarah dusun (MUSDUS) agar tujuan dari program tersebut dapat tercapai dan tepat sasaran.

Penyampaian informasi pelaksanaan program desa yang akan dilaksanakan kepada perangkat desa dan masyarakat sudah jelas. Oleh karena itu apabila penyampaian informasinya sudah baik maka hasilnya juga baik. Pelaksanaan program desa juga sudah konsisten sehingga tidak membingungkan bagi para pelaksana program.

c. Faktor Disposisi

Peran TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dan panitia dusun dalam program desa sangat penting, perhatian untuk mereka perlu untuk memenuhi kepentingan pribadi. Dengan biaya operasional yang diberikan walaupun sedikit dan tidak sebanding dengan pengabdian mereka untuk ikut membantu menjalankan kegiatan program dengan sukarela turut keberhasilan program desa di Desa

Banjarsari Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang.

d. Faktor Struktur Organisasi

Sistem dan prosedur kerja atau *Standar Operating Prosedure (SOP)* yang berlaku di Desa Banjarsari tidak jauh berbeda dengan instansi pemerintah daerah lainnya. Jam kerja yang ditetapkan adalah mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.30 WIB dengan waktu istirahat pada pukul 12.00-12.30 WIB. Sehingga penetapan standar dan jadwal yang dilakukan para pelaksana secara jelas.

Sebuah program tidak akan berjalan sendiri dengan baik apabila tidak ada keterkaitan dengan pihak lainnya. Seperti pelaksanaan program desa ini yang berkaitan dengan berbagai pihak yang sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan usaha dalam mewujudkan program ini, misalnya seperti panitia dusun, masyarakat, kecamatan, polsek dan koramil.

4. SIMPULAN

a. Kesimpulan

1. Pelaksanaan program desa yang didanai oleh APBN (dana desa) tahun 2016 di Desa Banjarsari Kecamatan Grabag kabupaten Magelang bisa dikatakan efektif. Hal ini ditunjukkan dari pelaksanaan program desa yang sudah dilaksanakan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tujuan tercapai, memberikan perubahan nyata dan semua pihak yang terlibat paham dengan proses pelaksanaan program desa ini.

2. Faktor pendorongnya yaitu Faktor komunikasi, Faktor disposisi dan Faktor struktur organisasi. Faktor penghambatnya yaitu Faktor sumber daya.

b. Saran

1. Perlu dilakukan pelatihan BIMTEK tentang penggunaan komputer kepada seluruh Perangkat Desa Banjarsari agar semua perangkat bisa mengoperasikan komputer sehingga Sumber Daya Manusia dan kinerjanya menjadi lebih baik.
2. Perlunya penambahan fasilitas (sarana dan prasarana) yang lebih mendukung bagi pelaksanaan program desa agar dapat meningkatkan kinerja pelaksana yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] *Data Tanah Lonsor Geospasial BNPB Tahun 2015.*
- [2] Hidayah, Pepy Novia. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Taktakan Kota Serang.* Skripsi. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang.
- [3] Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan dan Kelembagaan Pengawasan.* Bandung: PT. Refika Aditama.
- [4] Meleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- [5] *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.*
- [6] Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2012. *Manajemen Pelayanan (Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter Dan Standar Pelayanan Umum).* Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- [7] *Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2016.*
- [8] *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2011-2015.*
- [9] Rukmana, Novayanti Sopia. 2013. *Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Derah Di Puskesmas Sumbang Kecamatan Curio Enrekang.* Skripsi. Universitas Hasanuddin Makasar.
- [10] Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- [11] Sutrisno, Edy. 2007. *Budaya Organisasi.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [12] *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*